

PROSEDUR STANDAR PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Nomor Dokumen: PR-DU-GCS: 005

	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Corporate Communication Department Head	Olola Nabila	22 JULI 2025
Diperiksa oleh	PGS Corporate Secretary Division Head	Yully Purwanti	82.07-2025
Diverifikasi oleh	Governance & Risk Group Head	Ibnu Wahyudi	
Disetujui oleh	Direktur Utama	Raisha Syarfuan	

No. Salinan:

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT Sarinah



PT SARINAH				
PROSEDUR STANDAR	Doc. No.	PR-DU-GCS:005		
PROSEDOR STANDAR	Revisi	00		
ATUS INFORMASI YANG	Tanggal Efektif	_		
CUALIKAN	Halaman	1 dari 4		

PENGUBAHAN STA DIKECUALIKAN

I. TUJUAN:

Prosedur ini menjelaskan proses evaluasi ulang atas informasi yang sebelumnya dikecualikan, untuk menentukan apakah statusnya dapat diubah menjadi informasi publik.

II. RUANG LINGKUP:

Dimulai dari permintaan pemohon atau evaluasi berkala, pelaksanaan uji konsekuensi ulang, sampai dengan penetapan perubahan status dan pembaruan daftar informasi publik.

III. REFERENSI

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik:
- 4. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor 057/KPTS/DIREKSI/XII/2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Informasi PT Sarinah (Persero)
- 5. Keputusan Direksi PT Sarinah Nomor 0082/DIREKSI/KPTS/XI/2024 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Sarinah
- 6. Peraturan Direksi PT Sarinah Nomor: 0010/DIREKSI/PD/XI/2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Penyusunan Pedoman, Prosedur dan Instruksi Keria PT Sarinah.

IV. DEFINISI:

Daftar Informasi Publik (DIP)

: Dokumen yang memuat jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan, disediakan setiap saat, serta informasi serta

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab atas layanan dan pengelolaan informasi publik di PT Sarinah.

Atasan PPID

Pejabat yang secara struktural membawahi PPID dan bertugas memberikan persetujuan terhadap dokumen kebijakan informasi publik.

Petugas Pelayanan Informasi

: Pelaksana teknis harian layanan informasi pada

perusahaan

Tim Pertimbangan PPID

Pejabat di perusahaan yang memiliki tugas, fungsi, dan kompetensi di bidang hukum dan tata kelola perusahaan. warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang

Pemohon Informasi Publik

mengajukan permintaan Informasi Publik.

Informasi Berkala

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, selambat-

lambatnya satu kali dalam setahun yang meliputi informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan, Informasi mengenai

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT. Sarinah



PT SARINAH PROSEDUR STANDAR Doc. No. Revisi PR-DU-GCS:005 Revisi 00 TUS INFORMASI YANG Tanggal Efektif UALIKAN Halaman 2 dari 4

PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

laporan keuangan, dan/atau Informasi lain yang diatur

dalam perundang-undangan.

Informasi Serta Merta : Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi Tersedia Setiap Saat : Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah pengawasan Perusahaan, tidak termasuk Informasi yang

Dikecualikan.

Informasi yang Dikecualikan Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik atau Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi

Publik.

Uji Konsekuensi

: Proses analisis dan pertimbangan yang dilakukan untuk

menentukan status pengecualian informasi.

V. CATATAN REVISI

No.	Rev.	Tanggal Efektif	Alasan Revisi
1	1	Juli 2025	Mencabut SOP No SOP-DIR-PPID-
			007 tahun 2020



_				
PT Sarinah	Dokumentasi (PPID)	Informasi dan	Pejabat Pengelola	

	DT Carinah
	Dokumentasi (PPID)
71301	Informasi dan
7 2 2	Pejabat Pengelola
iang	

Kumentasi (PPID) Sarinah		jabat Pengelola
	Disahkan Oleh	i aliyyal ciektii L

(PPID)	n n		
	Disahkan Oleh	Tanggal Efektif Dilakukan	Tanggal Pembuatan

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2025 2025

PT Sarinah

PR-DU-GCS-005

No. Standar Operasional

Kualifikasi Pelaksana: Alur Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

Nama/Judul SOP

1. PPID PT Sarinah memahami:

2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- c. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok serta Fungsi
- 2. Petugas Layanan Informasi PT Sarinah memiliki
- kemampuan:

a. Memahami inventarisasi, penyediaan, pendokumentasian, dan

b. Memahami penggunaan teknologi informasi

pengelolaan informasi

ALUR PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

2	 	ï	NO
Mengirimkan undangan Uji Konsekuensi kembali kepada Tim Pertimbangan dan divisi lain yang terkait jika diperlukan	Menerima permintaan Informasi Publik yang termasuk Informasi yang Dikecualikan ataupun melakukan proses pembaharuan kembali secara berkala untuk menguji relevansi	2	URAIAN PROSEDUR
		3	PETUGAS LAYANAN INFORMASI PT SARINAH
		4	PELAKSANA PPID PT SARINAH
		5	PPID ATASAN PPID PT SARINAH
Internal memo	1. Permintaan Informasi Publik 2. Daftar Informasi yang Dikecualikan	7	KELENGKAPAN
2 hari	1 hari	œ	WAKTU (Hari Kerja)
Internal memo undangan	Justifikasi pengubahan status Informasi yang Dikecualikan	9	ОПТРП

7	O	UT	4	ω
Memasukan Informasi yang sudah ditetapkan perubahannya ke dalam Daftar Informasi Publik (terbuka)	Memberikan persetujuan penetapam Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan	Memberikan paraf pada konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan dengan mengacu pada hasil angka 4 dan melaporkan kepada Atasan PPID PT Sarinah	Menyusun konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan dengan mengacu pada hasil pada angka 3 dan melaporkan kepada PPID PT Sarinah	Memimpin jalannya Uji Konsekuensii yang dihadiri PPID, Tim Pertimbangan PT Sarinah dan pimpinan divisi terkait atas Informasi yang Dikecualikan yang diminta oleh Pemohon.
	-			
Penetapan pengubahan status Informasi yang Dikecualikan	Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan Lampiran berupa Hasil Uji Konsekuensi	Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan Lampiran berupa Hasil Uji Konsekuensi	 Hasil Uji Konsekuensi Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan 	1. Permintaan Informasi Publik 2. Daftar Informasi yang Dikecualikan 3. Regulasi internal & eksternal terkait
1 hari	5 hari	2 hari	1 hari	1 hari
Daftar Informasi Publik (terbuka)	Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan	Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan	Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan	Hasil pertimbangan kembali/ Uji Konsekuensi